

KERUGIAN MENCAI Rp5 MILIAR

Ratusan Warga Bogor Jadi Korban Investasi Bodong

BOGOR (IM)- Ratusan warga Bogor menjadi korban investasi bodong bernama Ed Cash. Kerugian yang dialami warga mencapai Rp5 miliar.

Warga sempat mendatangi rumah pelaku Abdurrahman Yusuf di Cilame, Bekasi, Jawa Barat, namun tidak berhasil menemui pelaku.

Diana Pucuk, salah seorang korban investasi bodong warga Ciampea Kabupaten Bogor, kini hidup di rumah kontrakan berpetak. Diana adalah salah satu dari ratusan nasabah investasi bodong Ed Cash yang jumlahnya ratusan orang, di berbagai daerah di kota dan Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, Diana tertarik dengan Ed Cash karena investasi koin yang ditawarkan Haji Mulyana. Setelah bergabung, Diana merekrut rekan dan keluarga terdekat yang jumlahnya mencapai 40 orang. Dari 40 orang yang

diajak berinvestasi dengan berbagai jumlah nominal dari Rp5 juta hingga ratusan juta rupiah.

Setelah bergabung, Diana yang telah menyetorkan uang dari kerabatnya kepada Abdurrahman Yusuf, menunggu hasil hingga setahun tak kunjung ada pencairan, Diana dituntut bertanggung jawab kepada owner. Namun tidak ada upaya pencairan, hingga akhirnya Diana mendatangi rumah owner di Cilame Bekasi, Jawa Barat. "Saya sudah habis-habisan, dua rumah bahkan perabotan rumah tangga sudah saya jual menjadi jaminan untuk nasabahnya," tutur Diana.

Kini Diana tinggal di rumah kontrakan yang sempit, dia berencana mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan kasus investasi bodong pada Jumat (16/4). Dia berharap agar dana miliknya segera dikembalikan.

● pra

Antrean Panjang Calon Penumpang KRL Terjadi di Stasiun Bogor

BOGOR (IM)- Penumpukan calon penumpang KRL terjadi Kamis (15/4) pagi. Diduga antrean ini lantaran para pekerja mempunyai jam kerja sama di bulan Ramadan.

Berdasarkan pantauan, antrean para penumpang kereta itu mengular hingga sekitar satu kilometer (km) mulai dari pintu masuk pembelian karcis penumpang hingga ke halaman parkir di stasiun tersebut.

Salah seorang calon penumpang KRL, Nisya (22) mengungkapkan antrean panjang terjadi sejak masih pagi hari. "Saya jam 06.00 WIB sudah di sini dan sudah antre," katanya.

Kata dia, antrean penumpang di stasiun sudah terjadi sejak hari pertama kerja di bulan Ramadan. "Tidak hanya pagi, sore jam pulang pukul 16.00 juga di Stasiun Sudirman sama. Penumpang antre," papar Nisya yang bekerja di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Panumpang lain, Erich (35) menuturkan, meningkatnya volume penumpang diduga para pekerja mempunyai waktu kerja yang seragam di bulan Ramadan. Masuk mulai pukul 09.00 dan pulang pukul 16.00.

"Ramadan ini kan waktu kerja dipotong hanya 6 jam dan semua pekerja sama waktu kerjanya. Jadi penumpang berangkat secara bersamaan," katanya. Sementara di luar stasiun

terdapat beberapa bus yang disediakan. Namun hal tersebut tidak memengaruhi antrean yang ada di dalam Stasiun Bogor.

Sebelumnya, ramai di media sosial Twitter salah satu penumpang mengeluhkan panjangnya antrean di Stasiun Bogor. Di akun Twitter tersebut para penumpang mengunggah sejumlah foto dan video yang memperlihatkan kondisi antrean penumpang yang mengular di Stasiun Bogor.

"Sampai kapanpun kami akan setia antre begini demi utk naik @CommuterLine karena kami pengguna setia KRL dan utk berangkat kerja mencari nafkah buat keluarga... Cc @kemenhub151 @BudiKaryaS @CurhatKRL @krlmania," tulis Gunawan Nagaswara akun twitter @GunzDJ-Naga.

Gunawan mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan antrean penumpang yang mengular sebelum masuk ke Stasiun Bogor. Bahkan antrean penumpang disebutkan sampai pintu keluar utama mobil.

"Pagi ini Pk. 06.27 wib sts bogor penumpang mengantri sampai pintu keluar utama mobil dan kami sebagai penumpang hanya bs pasrah utk ikut mengantri.mau tidak mau karena kami hrs bekerja mencari nafkah, kami hanya pengguna setia @CommuterLine cc @kemenhub151 @BudiKaryaS," lanjut cuitannya. ● gio



IDN/ANTARA

PENCAIRAN GANTI RUGI PETROCHEMICAL COMPLEX

Seorang warga menunjukkan bukti pencairan ganti rugi pembangunan Petrochemical Complex di kantor BPN Indramayu, Jawa Barat, Kamis (15/4). Sebanyak 531 warga menerima pembayaran uang ganti rugi pelepasan hak pengadaaan tanah untuk pembangunan Petrochemical Complex Jawa Barat tahap pertama dengan luas lahan mencapai 162,12 hektare.

Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Tinggi Selama Pandemi

BANDUNG (IM)- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Jawa Barat, mengungkapkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak di triwulan pertama di masa pandemi Covid-19 tinggi. Salah satu faktor pemicu dan penyebabnya yaitu permasalahan ekonomi. "Dari Januari sampai Maret 125 (kasus) bayangkan saja, tahun lalu sampai akhir tahun 325, triwulan pertama sudah 125. Mudah-mudahan harapan kita jangan naik," ujar Sekdis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Irma Nuryani, Kamis (15/4).

Ia menuturkan, kekerasan terhadap perempuan di antaranya terkait kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Sedangkan kekerasan terhadap anak terkait pelecehan seksual. Jumlah kasus yang meningkat di triwulan pertama dipengaruhi kesadaran masyarakat yang meningkat untuk melaporkan tindak kekerasan.

"Alhamdulillah, sekarang banyak masyarakat peduli terhadap tindakan kekerasan, jadi banyak yang melaporkan. Melapor tetangganya, saudaranya dan tindakan kekerasan teehadap anak terkait seksual anak banyak," kata dia.

Ia mengungkapkan, pihaknya

melakukan pendampingan secara psikologi terhadap korban kekerasan hingga jika kasus tersebut berlanjut ke wilayah hukum. Selain itu, pihaknya melakukan penilaian atau assesment terhadap korban kekerasan tersebut.

Irma mengatakan, seluruh pelayanan dan pendampingan yang dilakukan bersifat gratis. Oleh karena itu, masyarakat diminta melaporkan apabila mengetahui terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Mungkin dalam pandemi ini (penyebabnya) karena sering banyak bertemu (suami istri) dan faktor ekonomi. Sehari 24 jam banyak kaum bapak tidak bekerja bersama dalam satu rumah tangga kesadaran kurang emosi tinggi," kata dia.

Irma menambahkan, sejauh ini belum terdapat laporan yang diterima terkait perdagangan perempuan dan anak. Pihaknya juga mendorong lingkungan korban kekerasan untuk terlibat dalam proses pendampingan dan pemulihan.

Terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah anak oleh Marbot di wilayah Cidadak, ia mengaku sudah mendorongan lingkungan korban trauma healing kepada para korban. Pihaknya terus memantau perkembangan anak hingga dalam kondisi sehat. ● pur

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

KTP ELEKTRONIK BAGI WARGA BINAAN

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Bandung Prihartati (tengah) memberikan KTP elektronik kepada perwakilan warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/4). Pemerintah Kota Bandung melalui Disdukcapil melakukan perekaman KTP elektronik bagi 84 Warga Binaan Lapas Anak serta membagikan 222 KTP elektronik kepada warga binaan lapas perempuan yang ditujukan untuk keperluan vaksinasi massal COVID-19 bagi warga binaan yang membutuhkan KTP sebagai salah satu persyaratan.

DPRD Provinsi Jabar Dukung Pembentukan DOB Bogor Timur

Pemekaran Wilayah Bogor Timur saat ini menjadi satu kebutuhan demi tercapainya pelayanan pemerintah yang efektif dan merata dan percepatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Wilayah Bogor Timur.

BANDUNG (IM)

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat turut mendukung upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam membentuk daerah otonomi baru (DOB) Bogor Timur. Menurutnya, secara politis hampir semua fraksi di DPRD Provinsi Jawa

Barat mendukung langkah Pemkab Bogor tersebut.

Dia mengatakan, pihaknya tidak ragu dengan Pemkab Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan DOB Bogor Timur. Meski demikian, menurutnya masih banyak hal yang harus dilengkapi dan dipersiapkan

oleh Pemkab Bogor, yang selanjutnya akan dilakukan persetujuan bersama dengan Gubernur Jawa Barat mengenai persiapan (DOB).

"Artinya masih lebih banyak langkah yang harus dilakukan untuk menjadi daerah otonom baru ke depan. Bogor Timur ini adalah pengajuan DOB kedua setelah gelombang pertama persiapan DOB Bogor Barat," kata Sadar.

Setelah persiapan tersebut selesai, sambung Sadar, DPRD Provinsi Jawa Barat bisa segera membuat MoU kesepakatan dengan Gubernur Jawa Barat, mengenai pengajuan calon DOB. Khususnya DOB Bogor Timur.

"Mudah-mudahan semuanya

berjalan dengan baik dan apa yang menjadi keinginan kita dan harapan masyarakat bisa terwujud dengan pembentukan calon daerah otonomi baru ini," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, pemekaran DOB merupakan upaya Pemkab Bogor untuk menciptakan pemerintah yang efektif dan efisien berdasarkan kondisi riil daerah.

Menurutnya, jumlah penduduk yang sangat banyak, menjadikan beban Pemkab Bogor cukup berat. Terutama dalam hal memberikan pelayanan prima secara efektif dan merata serta melakukan pemerataan pembangunan.

"Maka pemekaran Wilayah

Bogor Timur saat ini menjadi satu kebutuhan demi tercapainya pelayanan pemerintah yang efektif dan merata dan percepatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Wilayah Bogor Timur," kata Burhanudin.

Diketahui, selain memiliki wilayah yang luas, Kabupaten Bogor juga memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang mencapai 5,4 juta orang, atau 11,24 persen dari penduduk Jawa Barat. DOB Bogor Timur nanti akan memiliki tujuh kecamatan dan 75 desa. Terdiri dari Kecamatan Gunung Putri 10 desa, Cileungsi 12 desa, Klapanunggal 9 desa, Jonggol 14 desa, Cariu 10 desa, Sukamakmur 10 desa, dan Tanjungsari 10 desa. ● pur

Cegah Kelangkaan, Pengiriman Elpiji Bersubsidi di Bogor Ditambah

BOGOR (IM)- Guna memastikan stok elpiji aman saat Ramadan dan Idulfitri, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bogor menambah 50% stok elpiji bersubsidi dari 244 tabung setiap pengiriman ke wilayah Bogor.

Ketua Hiswana Migas

Bogor Raya, Asep Erri mengatakan, potensi kelangkaan gas melon dipastikan sangat kecil terjadi, lantaran pada hari ini pihaknya bakal menambah stok gas melon. Kata dia, mulai Rabu (14/4), stok gas melon untuk kota dan kabupaten Bogor ditambah. "Hal ini untuk mencegah potensi terjadinya kelangkaan

gas melon di masyarakat," kata Asep, Kamis (15/4).

Berdasarkan data, jumlah pengiriman gas melon di kota dan kabupaten Bogor, berjumlah sekitar 224.000 tabung gas elpiji 3 kilogram dan disebarkan ke 92 agen dan 400 pengecer di kota dan kabupaten Bogor. "Jumlah tambahannya sekitar 50% dari

alokasi harian atau 112 ribu tabung gas melon," ujarnya.

Setiap bulan, kata Asep, kuota elpiji 3 kg untuk wilayah Kabupaten dan Kota Bogor sebanyak 4,3 juta tabung. Permintaan bertambah menjadi 4,5 juta tabung selama masa transisi kelangkaan elpiji dan kuota tersebut bisa berkurang atau tetap melihat situasi di lapangan

nantinya.

Sejauh ini warga mengaku stok elpiji masih normal. Namun, harga eceran elpiji 3 kg di pengecer/warung mencapai Rp 20.000 hingga Rp 22.000 per tabung. Padahal, harga eceran tertinggi yang ditetapkan di tingkat pangkalan Rp 16.000 per tabung. ● gio

Insentif Nakes Covid-19 di Bandung Barat Sudah 4 Bulan Belum Cair

BANDUNG BARAT (IM)- Tenaga kesehatan (nakes) di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan belum cairnya insentif penanganan Covid-19 sejak empat bulan terakhir dihitung pada Desember 2020 hingga Maret 2021.

"Sudah empat bulan insentif kami nakes di Bandung Barat belum dicairkan," ungkap salah seorang nakes di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemda KBB, yang enggan disebutkan namanya, Kamis (15/4).

Dirinya mengaku sudah sempat mencoba menanyakan perihal keterlambatan pencairan tersebut ke manajemen rumah sakit tempatnya bekerja. Namun dirinya tak mendapatkan jawaban memuaskan.

"Sudah pernah ditanyakan tapi ya jawabannya memang tidak memuaskan karena mereka juga tidak memberikan jawaban yang detail. Tapi

kabarnya memang sudah dianggarkan, hanya belum tahu kapan cairnya," tuturnya.

Keterlambatan pencairan insentif untuk nakes khususnya di Bandung Barat sendiri bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya hal serupa dialami para nakes meskipun akhirnya mereka menerima insentif tersebut.

"Sudah pernah, tahun sebelumnya juga terlambat (pencairan insentif). Walau akhirnya memang dibayarkan juga," katanya.

Tak cuma mengeluhkan soal keterlambatan pencairan nakes, mereka juga mengkritisi sarana dan prasarana bagi nakes di Bandung Barat yang langsung bersentuhan dengan pasien terpapar Covid-19.

"Sebetulnya bukan cuma insentif yang bermasalah, tapi mengenai sarana prasarana, pelayanannya, mengenai intervensi atau kebijakan manajemen di Bandung Barat

mengenai klaim Covid-19 yang kemana perginya, itu juga jadi masalah buat kami para nakes," terangnya.

Kendati dihantam banyak permasalahan, namun ia dan nakes lainnya di Bandung Barat tetap bekerja secara profesional menangani pasien Covid-19 yang silih berganti setiap harinya.

"Kami sama dengan yang lainnya, sama-sama lelah, capek, dan ingin urusan Covid-19 ini segera selesai. Cuma kami sadar kalo itu tidak mungkin. Makanya kami tetap bekerja secara profesional, saling mengingatkan dengan rekan nakes lainnya untuk berjuang selama pandemi ini ada," tegasnya.

Sementara itu pihak Pemda

KBB sendiri baik Dinas Kes-

ehatan dan Plt Bupati Bandung

Barat belum memberikan jawaban

apapun saat dikonfirmasi

perihal keterlambatan pencairan

insentif nakes. ● pur



IDN/ANTARA

PROGRAM REVITALISASI DANAU KRITIS

Nelayan mencari ikan di Danau Rawa Pening yang ditumbuhi tanaman eceng gondok (eichornia crassipes) di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (15/4). Danau seluas sekitar 1.850 hektare dengan volume tampung 48,15 juta meter kubik tersebut menjadi satu dari delapan danau kritis yang menjadi danau super prioritas program Kementerian PUPR untuk direvitalisasi sebagai pengendali tata kelola air.

Pemkab Bogor Tingkatkan Promosi Wisata demi Ekonomi

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, akan meningkatkan promosi pariwisata di wilayahnya demi memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19.

"Dalam rangka pemulihan ekonomi, pariwisata menjadi sektor andalan," kata Komite Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar usai rapat bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor di Gigombong, Bogor, Rabu (14/4) kemarin.

Menurutnya, kini Pemkab Bogor bersama stakeholder pariwisata tengah melakukan promosi wisata secara digital, karena lebih efektif di tengah pandemi. Salah satu promosi secara digital yang dilakukan oleh Pemkab Bogor yaitu menggelar lomba video yang menayangkan lokasi-lokasi pariwisata Kabupaten Bogor.

Gus Udin sapaan Saepudin menyebutkan selain promosi, Pemkab Bogor memiliki sejumlah kendala dalam memajukan

pariwisata, seperti lemahnya branding, lemahnya manajemen, rendahnya infrastruktur, transportasi publik kurang mendukung, dan maraknya pungli.

Sementara itu Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan pandemi Covid-19 berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor yang diperkirakan mencapai 2,6 persen. "Angka kemiskinan meningkat, prediksi presentase penduduk miskin Kabupaten Bogor tahun 2020 sebesar 9,26 persen, meningkat 2,6 persen dari tahun 2019 sebesar 6,66 persen," ungkapnya.

Selain meningkatnya angka kemiskinan, Pemkab Bogor juga memiliki sejumlah tantangan lain dalam melakukan pemulihan ekonomi. Beberapa di antaranya yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang diprediksi menurun. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran di tahun 2020 yang diprediksi mencapai 12,97 persen, meningkat 3,91 persen dari tahun 2019 yang hanya 9,06 persen. ● gio

Gubernur Minta Perantau Minang Silaturahmi Lebaran Secara Virtual

PADANG (IM)- Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi meminta para perantau Minang tidak pulang kampung. Ia menyarankan, para perantau bersilaturahmi dengan sanak saudara di kampung secara virtual tahun ini.

"Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 para perantau diminta menahan diri untuk tidak pulang kampung dulu, jika hendak bersilaturahmi bisa secara daring," kata dia di Padang, Kamis (15/4).

Jika rindu dengan masakan

Minang, ia melanjutkan, perantau

Minang bisa meminta kerabat

mengirimkan makanan menggunakan

jasa ekspedisi. "Kepada perantau

sebaiknya mengurungkan niat dulu untuk pulang

kampung dan tetap berada di tanah

perantauan," ujarnya.

Gubernur mengatakan, pemerintah daerah akan melakukan pengawasan di pintu masuk yang dibatasi dengan provinsi lain untuk memantau pergerakan warga. "Tapi yang jelas, dari sisi perantauan tidak ada maskapai yang beroperasi, termasuk untuk bus angkutan darat," kata dia.

Ia berharap sinergi semua pihak untuk menekan pergerakan orang selama masa mudik Lebaran bisa meminimalkan penyebaran Covid-19. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga meminta perantau Minang yang ada di seluruh Indonesia tidak pulang kampung Lebaran tahun ini.

"Untuk sementara jangan ada dulu acara pulang kampung, termasuk kegiatan pulang basamo," katanya. ● pra